



# KLIPING KORAN

Sumber : Kompas, Republika, Koran Tempo, Suara Pembaharuan, Media Indonesia, Surabaya Pos, Surya, Malang Post, Bhirawa, Suara Indonesia, Koran Pendidikan, Majalah Tempo, Majalah GATRA, Jawa Pos/ Radar Malang, Seputar Indonesia, Pena Pendidikan ...

Tahun : 2017

Bulan : JAN, FEB, MAR, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOV, DES

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31 hal .....

turan Kemenristekdikti saja baru keluar 2017.

Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prof Dr H Mudjia Rahardjo MSi juga sepakat dengan adanya evaluasi kinerja dosen, termasuk kualifikasi guru besar itu. Adanya kebijakan sertifikasi dosen itu, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. "Selama ini yang terjadi ada tunjangan sertifikasi dosen, tapi tidak meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen," ungkap Mudjia, beberapa waktu lalu.

Saat ditanya bagaimana publikasi ilmiah dosen UIN Malang, Mudjia mengungkapkan masih jauh dari yang diharapkan. Dosen di kampus masih terjebak dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi saja, yaitu prioritas dalam mengajar. Sehingga mereka hanya terbebani untuk memenuhi standar beban kerja dosen.

"Proses peningkatan publikasi ilmiah terus kami dorong untuk dipublikasi. Jika tidak, maka tunjangan mereka akan dicabut sesuai Permenristekdikti itu," terangnya.

Namun, Mudjia menilai, sanksi pencabutan tunjangan itu tidak tepat jika dilakukan langsung. Seharusnya, para guru besar mendapatkan peringatan-

peringatan dulu sebelum ada pencabutan. "Saya tidak setuju jika tunjangan langsung dicabut tanpa diberi batas waktu untuk memperbaiki," tukasnya.

Rektor Universitas Merdeka Malang (Unmer) Prof Dr Anwar Sanusi SE MSi mendukung adanya dorongan untuk meningkatkan publikasi ilmiah itu. Namun, dia menyayangkan sosialisasinya terlalu mendadak. Seharusnya evaluasi dimulai dari 2017-2019, bukan malah dari 2015-2017. "Supaya para dosen dan profesor dapat mempersiapkan diri, apalagi untuk publikasi internasional," kritiknya.

Yang tidak dia setuju lagi soal pencabutan tunjangan. Sebab, tugas guru besar dan dosen tidak hanya memenuhi publikasi ilmiah saja. Tugas lainnya yaitu mengajar. "Kalau tunjangan profesinya dicabut karena tidak memenuhi publikasi ilmiahnya, penghargaan terhadap tugas mengajar bagaimana?" keluhnya. Maka, sebaiknya tidak dicabut, tapi dikurangi tunjangan profesi dosen berapa persen dari seharusnya yang diterima.

Pakar Pendidikan Universitas Negeri Malang (UM) Prof Dr Bambang Budi Wiyono MPd menilai positif untuk publikasi

karya ilmiah profesor. Namun, dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tidak hanya dalam bidang penelitian saja. Ada aspek pengajaran dan juga pengabdian.

Dia menyayangkan kebijakan pemerintah berlaku mundur. Kenapa tidak dimulai tahun 2017 ini saja. Menurutnya, menghasilkan satu karya ilmiah internasional bereputasi itu membutuhkan waktu paling cepat 10 bulan. "Dampak dari kebijakan ini, para profesor akan lebih fokus pada penelitian saja," imbuhnya.

Dia sendiri sebagai profesor golongan IV/d itu juga tidak lepas dari kebijakan tersebut. Namun, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dia sudah melakukan publikasi enam jurnal internasional. Dua di antaranya jurnal yang bereputasi seperti terindeks scopus. "Jadi, saya aman dengan kebijakan tersebut," terang dia.

Namun, baginya, publikasi internasional masih belum cukup. Buku ajar atau referensi yang bisa dihadirkan langsung kepada para mahasiswa juga tidak kalah penting. "Pengajaran berjalan lancar dan publikasi ilmiah internasional juga berjalan sehingga bebas dari ancaman tersebut," tukasnya. (kis/c2/abm)